

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Keolahragaan Di Kota Cimahi, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Impelemtasi Kebijakan Penyelenggaraan Keolahragaan Di Kota Cimahi.

Terdiri dari komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi

- a. Komunikasi : Dengan demikian peneliti dapat simpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelatih keolahragaan, melalui faktor komunikasi masih dianggap belum optimal dikarenakan beberapa faktor yaitu seperti, tidak tersebar atau tersampaikan undangan tersebut kepada seluruh pelatih yang menjadi target sasaran, kurang aktifnya pelatih terhadap program kebijakan penyelenggaraan pelatih keolahragaan, dan tidak ada tindak lanjut dari aparat dinas maupun aparat pelaksana program kebijakan penyelenggaraan pelatih keolahragaan.
- b. Diposisi : Dengan demikian peneliti dapat simpulkan bahwa pelaksanaan program kebijakan penyelenggaraan pelatih keolahragaan melalui faktor Disposisi/sikap masih dianggap belum optimal dikarenakan beberapa faktor yaitu seperti, dengan tidak

adanya loyalitas antar pegawai serta kurangnya dukungan dari aparat pelaksana yang sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya beberapa program kebijakan penyelenggaraan pelatih keolahragaan.

- c. Sumber Daya : Berdasarkan hasil pengamatan dan keterangan para informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah aparat pelaksana kebijakan tentang program kebijakan penyelenggaraan pelatih keolahragaan di Kota Cimahi memang masih kurang memadai, tapi jajaran aparat dinas memberikan solusi-solusi terbaik serta memberikan masukan berupa pemahaman dan akan berusaha menambah jumlah aparat pelaksana agar pelaksanaan program peningkatan kebijakan penyelenggaraan pelatih keolahragaan dapat berjalan optimal
- d. Struktur Birokrasi : Faktor Struktur Birokrasi masih dianggap belum optimal dikarenakan beberapa faktor yaitu seperti, dengan tidak mengikutinya prosedur yang telah ditetapkan, masih ada beberapa aparat pelaksana yang tidak mengikuti aturan tersebut, juga tidak berjalannya secara efektif koordinasi antar unit saat melaksanakan program kebijakan penyelenggaraan pelatih keolahragaan sehingga program tersebut tidak bisa dikatakan terlaksana secara optimal.

2. Faktor pendukung dan penghambat pengendalian RTH antara lain sebagai berikut:

a. Faktor pendukung : Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan keolahragaan di Kota Cimahi antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang kebijakan penyelenggaraan pelatih keolahragaan
2. Adanya kerjasama dengan instansi terkait antara lain :
  - Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
  - Pelatih Keolahragaan
  - Atlit Pencak Silat

3. Sumber daya yang memadai;

Maksudnya ialah memadainya jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan.

4. Tersedianya Anggaran.

Maksudnya ialah berupa dana yang di berikan pemerintah untuk melakukan pelaksana program agar tercapainya tujuan dari program tersebut.

- a. Faktor penghambat : Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan keolahragaan adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya sosialisasi aturan kebijakan tentang program kebijakan penyelenggaraan pelatih keolahragaan dari aparat pelaksana kepada pelatih keolahragaan.
  2. Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait seperti misalnya dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga.
  3. Kurangnya konsistensi dari aparat pelaksana  
Maksudnya ialah ketidak konsistenan aparat dalam melaksanakan program sesuai dengan kebijakan mengakibatkan suatu program tidak berjalan dengan semestinya.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Akademis**

Untuk menambah kegunaan keilmuan, disarankan pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan lainnya yang berkaitan dengan konsep-konsep manajemen pemerintahan seperti koordinasi dan pengawasan dalam implementasi kebijakan penyelenggara keolahragaan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan.

### 5.2.2 Praktis

1. Bagi pemerintah, baik Kota Cimahi maupun Dinas, mampu bertindak sebagai inisiator dalam mengkomunikasikan program-program pemerintah terkait implementasi kebijakan penyelenggaraan keolahraagaan lebih optimal, terutama melalui sosialisasi.
2. Upaya implementasi kebijakan yang telah ada sebaiknya disamakan dengan berbagai hal seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah,
3. Kemudian juga memprioritaskan atau menyediakan pelatih sesuai aturan yang telah ditetapkan bagi berbagai sektor terkait dengan kegiatan altit
4. Sebaiknya pemerintah daerah dan dinas berusaha bersikap lebih optimis, responsive dan memberikan penghargaan yang lebih memadai kepada atlit khususnya pencak silat terutama dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan kebijakan keolahraagaan di Kota Cimahi.